



20–21 JANUARI 2025

## **DISKUSI MAHASISWA DAN ANGGOTA LEGISLATIF: DISKUSI TERBUKA MEMBAHAS ISU-ISU KORUPSI MENDESAK**

Korupsi dalam berbagai bentuk terus terjadi di Indonesia. Media massa berturut-turut memberitakan kasus-kasus korupsi di berbagai lembaga pemerintah dan penegak hukum. Korupsi terus merambah ke berbagai aspek kehidupan. Bicara tentang banyaknya isu korupsi di negeri ini, ada yang harus menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pengesahan segera Undang-undang Perampasan Aset yang nasibnya masih menggantung dan penyusunan regulasi untuk mengatasi kejahatan terhadap perempuan yang disebabkan oleh korupsi.

Kedua isu ini menjadi tema diskusi yang diangkat SPAK Indonesia dalam diskusi antara mahasiswa dan anggota DPR RI didukung oleh International Foundation for Electoral System (IFES) pada bulan Januari 2025. Mengapa mahasiswa? Karena dalam catatan sejarah, mahasiswa adalah komponen masyarakat yang peka pada isu-isu di masyarakat dan paling vokal menyuatkan aspirasi rakyat.

Diskusi pertama bertema “Korupsi dan Kejahatan terhadap Perempuan : Urgensi Menemukan Bnetuk Aturan yang Tepat” diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2025 di tempat yang sama. Dalam diskusi ini nara sumber adalah anggota DPR, Syamsu Rizal M.I, Eva Nurcahyani, Koordinator Lingkar Studi Feminis (LSF) dan Judhi Kristantini (peneliti Sexual Corruption) dengan moderator Lira Redata. Mahasiswa yang hadir adalah anggota BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Asian Law Students Association Local Chapter (ALSAS)- Universitas Pajajaran, mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya, serta beberapa aktivis dari organisasi perempuan.



#1

Diskusi kedua dengan tema “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi” berlangsung dari tanggal 21 Januari 2025 di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. Nara sumber yang diundang adalah Nasir DJamil M.Si, anggota DPR komisi dan Dicky Anandya dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satu organisasi yang aktif memimpin koalisi masyarakat sipil untuk pengesahan Undang-undang Perampasan Aset. Mahasiswa yang dihadiri antara lain oleh anggota BEM Universitas Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Asian Law Students Association Local Chapter (ALSAS)- Universitas Pajajaran, mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya, serta beberapa aktivis dari organisasi perempuan. Diskusi ini dimoderatori oleh Lira Redata.



#2

Namun sangat disayangkan anggota DPR Komisi 3 tidak dapat hadir pada hari H dengan pemberitahuan yang sangat mendadak, sehingga tidak ada waktu untuk mencari pengganti. Forum tersebut kemudian menjadi forum bertukar pikiran antara wakil ICW dan para mahasiswa, yang ditutup dengan kesepakatan para mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang dapat mendorong DPR sebagai lembaga penyusun undang-undang segera mengesahkan Undang-undang Perampasan Aset sebagai salah satu upaya mendesak dalam pemberantasan korupsi.

Diskusi ini merupakan upaya mengingatkan DPR sebagai lembaga penyusun undang-undang akan pentingnya suatu bentuk regulasi untuk menutup pintu korupsi yang menjadi sebab terjadinya berbagai bentuk kejahatan terhadap perempuan, seperti perkawinan anak, perdagangan orang dan sexual corruption yang sebelumnya dikenal sebagai sextortion, hal yang belum tercakup dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, diskusi ini juga bertujuan memberikan edukasi publik bagi para mahasiswa dan masyarakat umum tentang bentuk-bentuk kejahatan terhadap perempuan terutama sexual corruption, yang banyak terjadi di kampus dan lembaga pemerintah. Dengan memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai isu ini, diharapkan mahasiswa dapat mendorong pihak kampus untuk membuat peraturan untuk mencegah serta melindungi korban. Dalam diskusi terungkap bahwa Satgas Kekerasan Seksual Kampus yang telah dibentuk selama ini tidak berfungsi dengan efektif dan korban tetap tidak terlindungi.

## Program Magang

Di tahun 2025 ini SPAK Indonesia membuka program magang bagi mahasiswa dan aktivis perempuan. Program magang ini memberi kesempatan untuk mengenal kegiatan-kegiatan SPAK Indonesia lebih dalam, sehingga dapat mendorong munculnya kader-kader baru untuk memperkuat gerakan.

Di bulan Januari 2025, SPAK Indonesia menerima 3 orang mahasiswa magang: 2 orang dari jurusan Desain Komunikasi Universitas Indonesia dan 1 orang dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.

Mahasiswa magang ini mendapat kesempatan untuk mengembangkan ide konten materi-materi komunikasi SPAK Indonesia di Instagram serta membantu penyelenggaraan diskusi mahasiswa dan anggota DPR RI di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Mereka belajar mengenal alat-alat bantu pendidikan antikorupsi yang biasa digunakan SPAK, terutama beragam permainan. Program magang ini selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin mengenal SPAK Indonesia dan tertarik untuk terlibat dalam kampanye pencegahan korupsi melalui pendidikan.

13, 21, 24, 26 FEBRUARI 2025

## ROAD TO IWD 2025: SERI WEBINAR MENYAMBUT HARI PEREMPUAN SEDUNIA

Hari Perempuan Sedunia tahun 2025 bertema #AccelerateAction mengajak perempuan seluruh dunia untuk bersama meningkatkan aksi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus, hak-hak dasar perempuan terampas akibat korupsi. Menyambut Hari Perempuan Sedunia 2025, SPAK Indonesia mengajak perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengenal bagaimana dampak korupsi bagi perempuan dalam berbagai aspek.

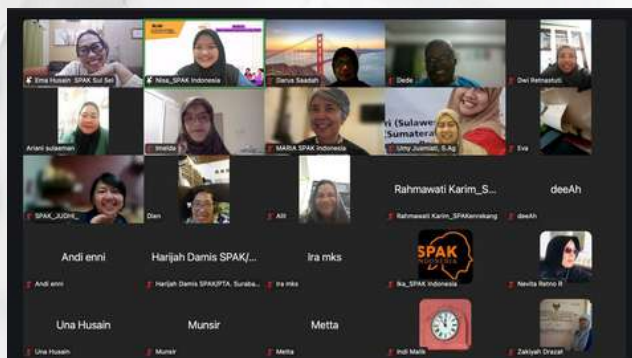


Webinar kedua bertema “Korupsi dan Perempuan Difabel” dengan nara sumber Puji Lestari, agen SPAK Gunung Kidul, seorang ibu dengan anak dan suami difabel. Puji Lestari sangat aktif melakukan pendidikan antikorupsi dan advokasi bagi para difabel, karena ia ingin anak dan suaminya dapat hidup dengan layak sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang sering turun ke lapangan, Puji Lestari mengalami dan melihat sendiri terjadinya praktik korupsi terhadap bantuan bagi kelompok difabel. Bagi perempuan difabel pemotongan ini memberikan beban lebih berat lagi dari perempuan pada umumnya, karena menghambat kemandirian mereka untuk dapat hidup setara dan berdaya. Ia mengajak masyarakat untuk peduli pada isu ini agar dapat membantu mendesak pemerintah melakukan tindakan untuk mengatasi korupsi pada kelompok difabel.

[Diskusi selengkapnya...](#)

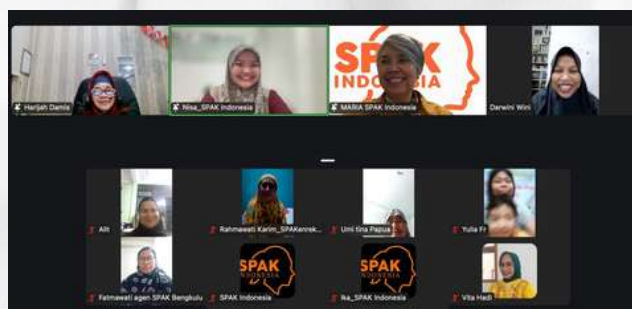
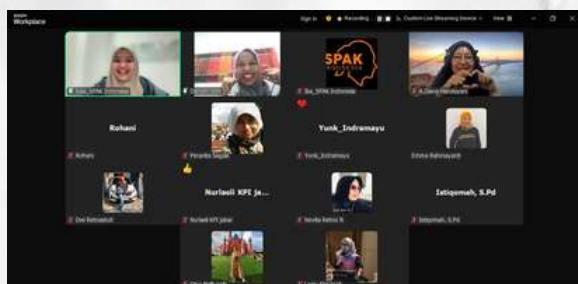
Dibuka dengan tema “Korupsi dalam Perspektif Gender”, Ema Husain, Agen SPAK Sulawesi Selatan sebagai nara sumber memberikan gambaran secara jelas, bahwa korupsi membawa dampak berbeda pada gender yang berbeda, walaupun secara umum korupsi memberi dampak bagi semua orang. Perempuan dengan segala kondisinya mendapat beban lebih akibat dari korupsi pada layanan publik, karena ia kesulitan mendapatkan salah satunya adalah layanan kesehatan bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi anak-anaknya. Belum lagi bentuk-bentuk korupsi yang membuka peluang terjadinya perkawinan anak, perdagangan orang dan sexual corruption (sextortion). Oleh karenanya pembuat kebijakan harus memiliki pemahaman tentang gender, sehingga dapat membuat kebijakan yang sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi perempuan akibat korupsi.

[Diskusi selengkapnya...](#)



Tema ketiga adalah “Korupsi, Demokrasi dan Perempuan” dibawakan oleh Darwinih, Agen SPAK dan aktivis perempuan dari Indramayu. Darwinih menyoroti bagaimana sistem patriarki menghalangi perempuan untuk berperan lebih besar. Belum lagi politik yang dikuasai segelintir elit sehingga perempuan makin tersisih. Ditambah lagi dengan korupsi yang tumbuh subur, keadilan bagi perempuan hanyalah ilusi. Darwinih mengajak perempuan bersuara melawan korupsi dan memastikan perempuan punya tempat di meja pengambilan keputusan. “Ketika satu tertinggal, kita semua terdampak”, demikian seruannya.

[Diskusi selengkapnya...](#)



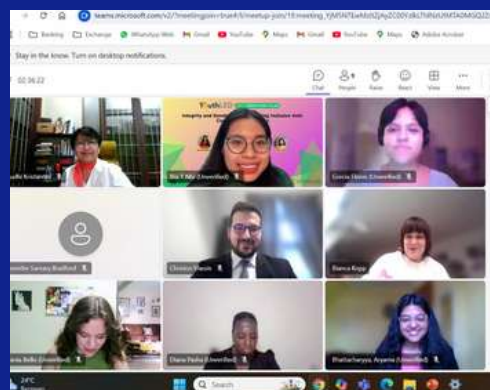
Webiner keempat bertema “Korupsi dan Perempuan dalam Penegakkan Hukum” dengan Harijah Damis, Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan Agen SPAK sebagai nara sumber. Harijah memiliki komitmen tinggi pada penegakan nilai-nilai antikorupsi dalam menjalankan tugasnya. Ia mendapat penghargaan dari KemenPan RB dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di pengadilan tempatnya bekerja saat di Lamongan, Jawa Timur. Harijah menyerukan, Pengadilan harus memastikan perempuan memperoleh hak-haknya saat berperkara, yang sering kali dihalangi praktek-praktek korupsi.

[Diskusi selengkapnya..](#)

## “INTEGRITY AND GENDER JUSTICE: BUILDING INCLUSIVE ANTI-CORRUPTION MOVEMENTS” WEBINAR DISELENGGARAKAN OLEH YOUTHLED, UNODC

SPAK Indonesia diundang menjadi pembicara dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Youthled-UNODC. Judhi Kristantini yang mewakili SPAK Indonesia sebagai nara sumber memaparkan bagaimana SPAK membangun kekuatan perempuan yang bermula dari gerakan yang inklusif.

Webinar ini adalah forum berbagi praktik baik beberapa negara dalam pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ini adalah kesempatan berharga bagi SPAK Indonesia untuk mengabarkan pada dunia bagaimana perempuan Indonesia bergandeng tangan dengan masyarakat sipil bergerak dan membuat dampak dalam pencegahan korupsi.



13, 21, 24, 26 FEBRUARI 2025

## INTEGRITAS DALAM IMPLEMENTASI NILAI AKHLAK BUMN : PELATIHAN WAWASAN KEBANGSAAN PT PETRO KIMIA GRESIK SURABAYA

PT Petro Kimia Gresik menyelenggarakan pelatihan untuk memperluas wawasan kebangsaan yang diikuti oleh karyawan satu dan dua tingkat di bawah Direktur. Pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Komando Pendidikan Maritim (Kodikmar) di Surabaya. Dalam rangkaian kegiatan, SPAK mengisi sesi terkait integritas, bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan nilai AKHLAK BUMN dan reputasi perusahaan.

Setelah mendapat penjelasan tentang bentuk-bentuk korupsi serta 9 nilai antikorupsi, para peserta diajak mengenali kasus-kasus korupsi dalam kehidupan sehari-



hari melalui board game SPAK dengan dipandu oleh agen-agen SPAK Surabaya. Para peserta mengakui permainan-permainan itu membuat mereka memahami korupsi dan sikap antikorupsi dengan lebih jelas.

Bagi SPAK Indonesia, ini adalah kesempatan untuk melakukan pendidikan antikorupsi di BUMN yaitu membangun kesadaran tentang pentingnya melandasi perilaku dengan nilai-nilai antikorupsi, sehingga menghasilkan kebijakan yang sungguh mengedepankan keadilan bagi masyarakat.



Bulan-bulan terakhir ini masyarakat dihujani berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan seolah tidak dipedulikan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan baru diputuskan tanpa partisipasi rakyat dan mempertimbangkan rasa keadilan rakyat. Belum lagi berita munculnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara dan penegak hukum, di tengah keputusan pemerintah memotong anggaran dan menyebabkan gelombang PHK. Masyarakat bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil pun bergerak untuk mengingatkan pemerintah, namun

28 MARET 2025

## TERUS MENYUARAKAN PERLAWANAN TERHADAP REPRESI PADA MASYARAKAT SIPIL MELALUI KOLABORASI BERSAMA SUARA IBU INDONESIA



pemerintah memilih untuk menjawab dengan represi yang dilakukan oleh tentara dan polisi.

Ini membuat perempuan khususnya para ibu gelisah dan prihatin. Melihat para mahasiswa diperlakukan dengan kekerasan, seperti melihat anak-anak kandung sendiri mengalaminya. Organisasi perempuan pun berkumpul dan berkolaborasi untuk melakukan aksi dengan nama Suara Ibu Indonesia. SPAK Indonesia sebagai salah satu organisasi yang menjadikan perempuan pemegang peran penting dalam gerakan pencegahan korupsi, turut bergabung untuk menanggapi situasi memprihatinkan yang dihadapi mahasiswa khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Pada tanggal 28 Maret 2025 Suara Ibu Indonesia berkumpul di Sarinah Thamrin, Jakarta, menyuarkan berbagai tuntutan di antaranya Kembalikan Tentara ke Barak, Polisi Hentikan Kekerasan pada Mahasiswa, Batalkan UU TNI. Selama panggilan itu adalah untuk menegakkan keadilan, maka SPAK Indonesia akan turut menyuarkan.

28 FEBRUARI 2025

## WEBINAR SERI BERAKHLAK “KORUPSI DAN KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN” PUSBANGKOM SDM LEGISLATIF SEKJEN DPR RI

SPAK Indonesia diundang oleh Pusat Pengembangan Komunikasi Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi nara sumber dalam salah satu serial webinar yang bicara tentang nilai-nilai berakhlak. Topik yang disepakati untuk dibawakan Judhi Kristantini dari SPAK Indonesia adalah “Korupsi dan Kejahatan terhadap Perempuan”. Ini adalah bagian pendidikan masyarakat tentang pentingnya pemahaman setiap orang bahwa korupsi dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan terhadap perempuan, misalnya perkawinan anak, perdagangan orang dan sexual corruption, isu yang belum diketahui secara luas.

Khususnya sexual corruption, yang sering terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, sangat banyak terjadi di kampus-kampus dan lembaga pemerintah. Belum adanya regulasi khusus terkait hal ini, menyebabkan korban kejahatan seksual terkait relasi kuasa belum terlindungi sepenuhnya dan tidak berani melaporkan kasusnya. Dengan memberikan pemahaman tentang hal ini pada forum SekJen DPR RI diharapkan ada upaya-upaya membuat regulasi sekurangnya berlaku internal lembaga tersebut untuk mencegah terjadinya sexual corruption yang kemungkinan saat ini terjadi dalam senyap.

4 MARET 2025

### DISKUSI DARING AGEN SPAK DISABILITAS DAN KOMISI NATIONAL DISABILITAS

Ketika SPAK mengadakan webinar bertajuk “Korupsi dan Perempuan Difabel” yang diselenggarakan SPAK untuk menyambut Hari Perempuan Sedunia 2025, mengemuka beberapa modus korupsi yang dialami komunitas disabilitas yang menjadi dampingan agen-agen SPAK di beberapa daerah. Maka, sebagai tindak lanjut dari webinar ini, SPAK menyelenggarakan diskusi daring yang mengundang agen-agen SPAK disabilitas dari berbagai daerah dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang saat itu dihadiri oleh Jona Aman Damanik.



Dalam diskusi itu para agen SPAK mengemukakan isu-isu yang mereka hadapi terkait pemotongan bantuan, kesempatan pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas. Melalui diskusi ini diharapkan KND mendapat masukan nyata kondisi di lapangan dan dapat melakukan tindak lanjut yang sesuai, serta kelompok disabilitas pun mendapat pemahaman tentang prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.